



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG INVESTIGASI

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Telepon: (021) 85910031 (*Hunting*); Faksimilie: (021) 85906467; e-mail: investigasi@bpkp.go.id

Nomor : LKIN- 827/Do/02/2016 11 November 2016
Lampiran : Satu lembar
Hal : Laporan Monitoring Kinerja
Deputi Bidang Investigasi s.d. Triwulan III Tahun 2016

Yth.
Sekretaris Utama
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta

Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Deputi Bidang Investigasi s.d. Triwulan III Tahun 2016.

A. Simpulan

1. Realisasi *outcome* program pengawasan tercapai 120%.
2. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 439 penugasan atau 200.46% dari rencana sebanyak 219 penugasan.
3. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 259 OIH atau 109,28% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
4. Realisasi anggaran sebesar Rp3.656.590.931,00 atau 54,64% dari rencana sebesar Rp6.692.629.471,00.

B. Capaian Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Deputi Bidang Investigasi merencanakan pencapaian satu sasaran strategis dan satu sasaran program. Capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dan indikator kinerja sasaran program (IKSP) pengawasan s.d. Triwulan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis dan Sasaran Program
s.d. Triwulan III Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)		Realisasi s.d. Trw. ini	Capaian (%)	
			Tahun 2016	s.d. Trw. ini		Tahun 2016	s.d. Trw. ini
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	<u>Sasaran Strategis</u> Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita	Skala 1-5	1	0	0	0	0
2	<u>Sasaran Program</u> Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada APH, K/L/P/K	%	60	60	87,88	120	120

Uraian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) adalah sebagai berikut:

“Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum, Kementerian, Lembaga, Korporasi”

Dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah, Deputi Bidang Investigasi menetapkan arah kebijakan peningkatan tata kelola atau *governance* yang memadai melalui pemantapan penerapan sistem pengendalian intern Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi (K/L/P/K) serta peningkatan kapabilitas pengawasan intern dan sinergitas APIP. Sebagai upaya untuk penyiapan landasan pembangunan yang kokoh, sistem pengendalian intern dan fungsi pengawasan internal perlu ditingkatkan melalui upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terus menerus, karena pada kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Upaya pencegahan korupsi dilakukan dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi serta memberikan pemahaman dan pengetahuan atas *fraud* melalui pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi. Dalam rangka pemberantasan korupsi, Deputi Bidang Investigasi meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Realisasi IKSP “Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum, Kementerian, Lembaga, Korporasi” sebesar 88,40% atau mencapai 120% dari target sebesar 60%. Pengukuran IKSP dihitung berdasarkan jumlah laporan yang diserahkan ke APH/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan yaitu 1.356 laporan dibandingkan dengan 1.543 permintaan penugasan.

Jumlah permintaan penugasan dan jumlah laporan yang diserahkan kepada APH/K/L/P/K sampai dengan Triwulan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum, Kementerian, Lembaga, Korporasi

No.	Instansi	Permintaan	Laporan	Capaian (%)
	Pengamanan Keuangan Negara/Daerah			
1	Aparat Penegak Hukum (Audit Investigatif, Audit PKKN, PKA, Komputer Forensik)	1.400	1.243	88,79
	Sub Jumlah	1.400	1.243	88,79
	K/L/P/K			
1	Instansi Lain	6	4	66,67
2	Hambatan Kelancaran Pembangunan	27	21	77,78
	Sub Jumlah	33	25	75,76
	Peningkatan Tata Kelola (Governance System)			

